

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang dapat mengakibatkan penerimaan per kapita penduduk bertambah dalam jangka panjang. Sasaran dari pembangunan ekonomi mempunyai sifat multidimensional, artinya sanggup membangun pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, menurunkan jumlah kemiskinan dan tingkat pengangguran, serta sanggup mengatasi persoalan ketimpangan. Salah satu tolak ukur suatu keberhasilan tingkat kesejahteraan masyarakat ialah adanya pertumbuhan ekonomi.

Mudrajat (1997:226) mengatakan bahwa Indonesia sendiri mempunyai sasaran yang ingin diwujudkan secara makro ekonomi, misalnya stabilitas perekonomian, tersedianya kesempatan kerja penuh dan inflasi yang minim, tingkat pengangguran yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang besar serta berkualitas.

Di negara yang sedang berkembang pada umumnya dihadapkan dengan persoalan yang spesifik dari gabungan persoalan mobilitas penduduk dari desa menuju kota dalam skala besar, produktivitas pertanian yang stagnan serta bertambahnya pengangguran dan underemployment di kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Salah satu sasaran penting dalam pembangunan ekonomi yaitu tersedianya lowongan pekerjaan yang memadai untuk mengikuti perkembangan angkatan kerja, dimana perkembangannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi ataupun

pembangunan dalam bidang lain selalu mengikutsertakan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diantaranya ditujukan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara maksimal dan kemanusiaan, menciptakan pemerataan kesempatan kerja serta tersedianya tenaga kerja yang berdasarkan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan dan keamanan pada tenaga kerja dalam menciptakan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta keluarga.

Namun, dalam tujuannya, negara Indonesia sering dihadapkan pada berbagai persoalan kependudukan, ketenagakerjaan serta bertambahnya tingkat pengangguran. Persoalan kependudukan yang dialami negara Indonesia yakni terjadinya ketidakseimbangan antara kuantitas penduduk yang tinggi akan tetapi tingkat sebarannya tidak merata.

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah aspek utama serta acuan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Keberhasilan Provinsi Jawa Timur didukung oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi yakni proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau mengalami perubahan dari masa ke masa yang terjadi dalam jangka panjang dimana bisa menurunkan atau meningkatkan, tetapi secara umum menggambarkan kecenderungan untuk naik.

Irawan dan M. Suparmoko (2002: 5) menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi disuatu negara dapat dipengaruhi oleh faktor-

faktor yakni aspek ekonomi maupun non-ekonomi (misal agama; kesehatan; sistem hukum; pemerintahan; pendidikan; serta lainnya).

Menurut Herawati (2017) mengatakan bahwa laju pertumbuhan yang cukup besar mengakibatkan meningkatnya kuantitas penduduk yang tinggi sehingga menimbulkan kuantitas tenaga kerja yang makin meningkat, sementara dibagian lain pembentukan kesempatan kerja yang relatif terbatas. Hal ini mengakibatkan pengangguran makin meningkat. Pada saat ini, pembangunan ekonomi di negara berkembang terus dilaksanakan dengan maksud untuk menambah laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan pertumbuhan angkatan kerja telah menyebabkan permasalahan sendiri. Dengan adanya ketidak-seimbangannya antara kuantitas penduduk yang semakin meningkat pada usia produktif serta penambahan jumlah angkatan kerja tanpa diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka akan menimbulkan kesempatan kerja yang menurun serta angka pengangguran yang makin meningkat. Hal ini dikarenakan belum berfungsinya semua sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratanya pembangunan disegala bidang, sehingga ketersediaan lowongan kerja tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan dinamis.

Pertumbuhan penduduk yang termasuk angkatan kerja di Indonesia serta di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja Di Indonesia dan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015**

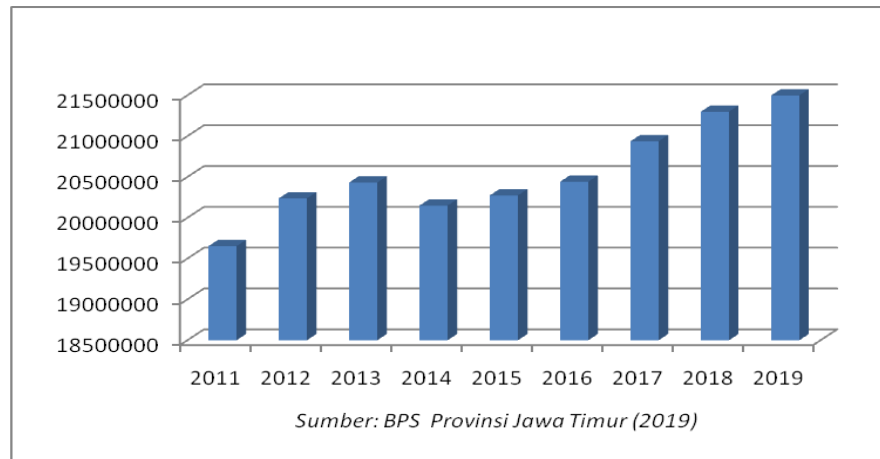
| Pertumbuhan Penduduk | Tahun       |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
| Indonesia            | 109,670,399 | 110,808,154 | 112,761,072 | 114,628,026 | 114,819,199 |
| Jawa Timur           | 18,940,340  | 19,081,995  | 19,553,910  | 19,306,508  | 19,367,777  |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (2019)*

Data di atas menunjukkan bahwa di Indonesia pertumbuhan penduduknya mengalami peningkatan setiap tahun. Akan tetapi, penduduk di Provinsi Jawa Timur tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Data pertumbuhan penduduk tersebut tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja di Jawa Timur yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini dikarenakan daya serap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur masih tergolong rendah, meskipun besaran upah minimum, pertumbuhan ekonomi serta investasi di Jawa Timur terdapat peningkatan setiap tahunnya.

Penduduk adalah potensi yang bisa ditekankan sebagai modal dalam usaha pembangunan. Dilihat dari aspek permasalahan ketenagakerjaan mempunyai penyebab yang berbeda, sehingga persoalan ketenagakerjaan bukan hanya masalah keterbatasan lowongan kerja serta rendahnya produktivitas penduduk. Seperti halnya dengan permasalahan kependudukan yang dihadapi oleh Pemerintah Jawa Timur yaitu terjadinya meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun, akan tetapi meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan kualitas penduduk yang berpendidikan. Terbatasnya pertumbuhan lapangan pekerjaan menjadi pemicu dan masalah terpenting dalam pembangunan ekonomi. Provinsi

Jawa Timur memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup tinggi. Data jumlah angkatan kerja Provinsi Jawa Timur dapat kita lihat dalam gambar berikut:



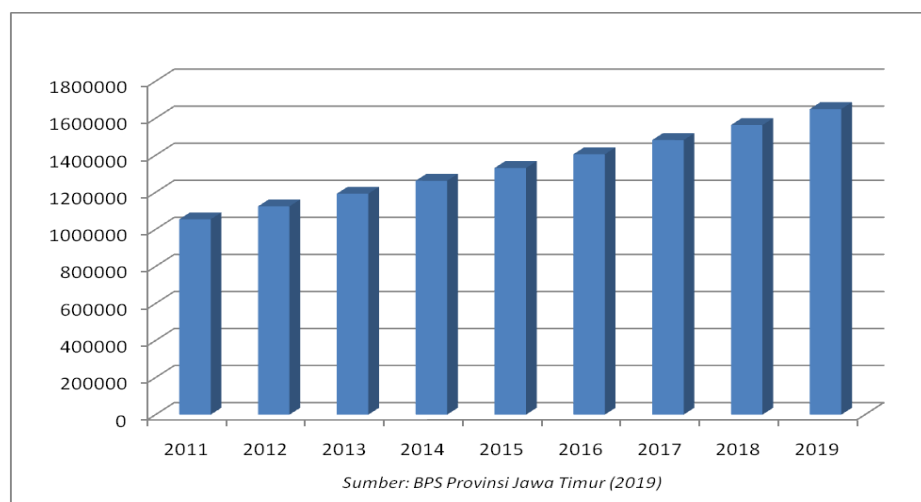
**Gambar 1.1 Jumlah Angkatan Kerja Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019**

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Jawa Timur setiap tahun mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan setiap tahun, akan tetapi pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mengalami penurunan sebanyak 20,149,998 jiwa.

Kemudian, tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah angkatan kerja Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan kembali sebesar 20,274,681 jiwa di tahun 2015. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 20,442,376 jiwa. Lalu di tahun 2017 terjadi kenaikan kembali sebesar 20,937,716 jiwa. Kemudian terjadi kenaikan di tahun 2018 sebanyak 21,300,423 jiwa. Dan terakhir peningkatan terjadi pada tahun 2019 sebesar 21,499,386 jiwa.

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja ini tentu akan memberikan kontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. PDRB ialah nilai tambah bruto dari keseluruhan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah domestic yang

muncul sebab dari semua kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan aspek produksi yang dimiliki residen ataupun non-residen. Besar kecilnya PDRB di suatu wilayah akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Berikut Gambar 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Milliar Rupiah), 2011-2019 secara rinci:



**Gambar 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019**

Berdasarkan Gambar 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Milliar Rupiah), 2011-2019 diketahui bahwa PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2015 hingga 2019. Dimana pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,331,418 miliar. Kemudian, di tahun 2016 sebanyak 1,405,564 miliar. Lalu, pada tahun 2017 terjadi peningkatan PDRB sebesar 1,482,300 miliar. Selanjutnya pada tahun 2018 pun mengalami kenaikan sebanyak 1,563,769 miliar. Terakhir pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 1,649,768 miliar.

Jumlah penduduk di Jawa Timur pada 2014 sebanyak 38.610.202 jiwa dan tahun 2015 sebanyak 38.847.561 jiwa (BPS Provinsi Jawa Timur, 2010). Bertambahnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan tersedianya lowongan pekerjaan yang ada, sehingga mengakibatkan besarnya tingkat unemployment sehingga dapat menghambat pembangunan.

Berdasarkan teori Keynes, menjelaskan bahwa pengangguran terbuka dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya belanja pemerintah. Dalam sistem pasar bebas, diperlukan upaya serta kebijakan guna menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh serta pertumbuhan ekonomi. Keynes mengemukakan pula bahwa kejadian yang sering dialami oleh perekonomian diantaranya pengangguran. Namun, dalam menyelesaikan kejadian tersebut diperlukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pengusaha.

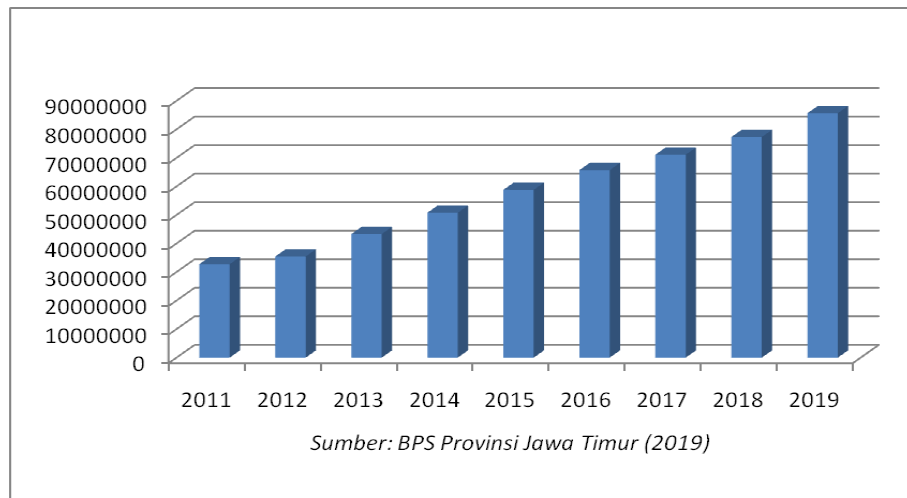
Permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah. Adanya perbedaan pendapat serta kepentingan antar para pelaku usaha dengan para pekerja atau buruh mengakibatkan munculnya persoalan yang selama ini terjadi dalam permintaan tenaga kerja. Sehingga untuk menjawab persoalan tersebut dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai upah minimum.

Umumnya kebijakan upah minimum yang telah digunakan di beberapa negara dapat diketahui dari dua sudut pandang yaitu upah minimum ialah alat perlindungan bagi pekerja untuk mempertahankan supaya nilai upah yang diperoleh tidak menurun guna mencukupi kebutuhan sehari-hari; selanjutnya, sebagai alat perlindungan bagi

perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Tingkat pengangguran dan jumlah kesempatan kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Terdapatnya kebijakan penetapan upah minimum di setiap kabupaten/kota, justru akan mengurangi pengaruh terhadap permintaan angkatan kerja.

Di Indonesia sistem pengupahan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempunyai kewenangan untuk mengubah aturan-aturan yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah mengenai pengupahan yang sebelumnya tertuang tercantum pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Kemudian, UU Ketenagakerjaan memiliki aturan turunan tentang pengupahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurut Rini Sulistiawati (2012), mengatakan bahwa standar kelayakan hidup yakni diantaranya parameter yang digunakan pemerintah dalam menetapkan peraturan pengupahan dan menentukan upah minimum. Pertumbuhan ekonomi yang makin bertambah diharapkan sanggup menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mampu menyediakan lowongan pekerjaan dengan besaran upah yang stimpan. Data Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2019 dapat dilihat secara rinci pada gambar 1.3 dibawah ini:

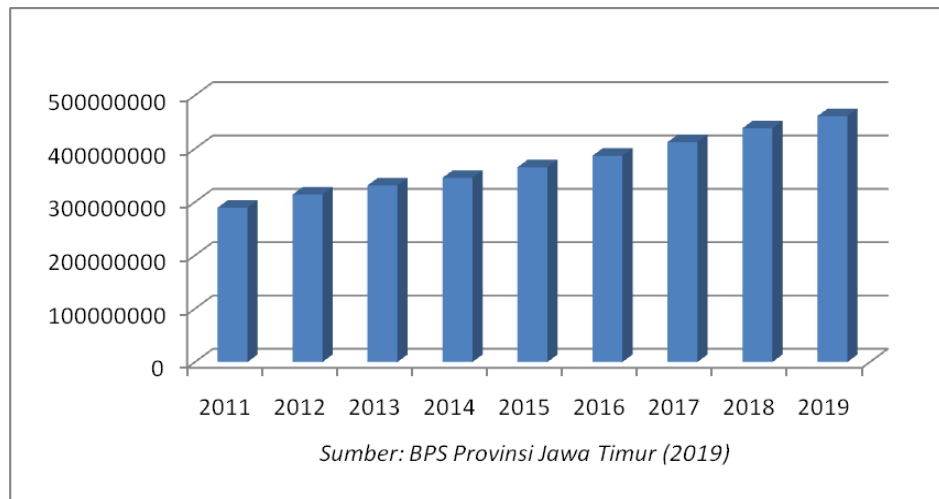


**Gambar 1.3 Besaran Upah Minimum Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019**

Dilihat dari Gambar 1.3 diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2011-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2019 berkisar antara Rp 1.700.000,- hingga Rp 3.800.000,- dengan upah minimum terbesar berada di Kota Surabaya dan terkecil berada di 9 kabupaten yakni Kabupaten Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Kabupaten Magetan.

Aspek produktivitas tenaga kerja; kebutuhan hidup layak (KHL); serta laju pertumbuhan ekonomi (LPE) harus diperhatikan oleh Dewan Pengupah yang telah dibentuk Gubernur. Hal ini selaras dengan pendapat Gie (1999: 569) yang menyatakan bahwa tolak ukur upah buruh harus ada batas minimumnya, dikarenakan negara berkembang tidak diperbolehkan sewenang-wenang menetapkan upah buruh serendah mungkin. Selanjutnya, secara langsung nilai investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga permintaan akan faktor produksi semakin meningkat termasuk tenaga kerja.

Data perkembangan investasi di Jawa Timur tahun 2011-2019 dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto. Lebih detail perkembangan nilai investasi di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1.4 Pertumbuhan Investasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019**  
Investasi di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan.

Hal ini terlihat dari tabel 1.4 Pertumbuhan Nilai Investasi bahwa pada tahun 2011 nilai investasi di Jawa Timur sebesar 289,328,691 juta rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2012 terjadi kenaikan investasi sebanyak 313,964,547 juta rupiah.

Begitu seterusnya pada tahun-tahun berikutnya yakni tahun 2013 hingga tahun 2015 yang masing-masing besaran kenaikannya yakni sebesar 331,070,210 juta rupiah di tahun 2013, begitu pula pada tahun 2014 terjadi peningkatan senilai 345,438,629 juta rupiah dan juga mengalami kenaikan nilai investasi di tahun 2015 sebanyak 365,147.589 juta rupiah.

Kemudian, pada tahun 2016 hingga tahun 2019 terjadi kenaikan pula dimana pada tahun 2016 terdapat peningkatan sebanyak 386,716,459 juta rupiah. Lalu di tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 412,157,417 juta

rupiah. Selanjutnya tahun 2018 mengalami peningkatan dengan jumlah 437,817,632 juta rupiah. Dan pada tahun 2019 terjadi penambahan sebesar 461,042,597 juta rupiah. Besarnya nilai investasi di Jawa Timur disebabkan aktivitas ekonomi yang masih tinggi.

Penelitian yang dilakukan Romi Akmal (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ketika terdapat peningkatan investasi sebesar 1%, maka akan menambah penyerapan tenaga kerja sebesar 0,01%. Penelitian Romi tersebut selaras dengan penelitian dari Nofandillah Arumsyah Putri dengan Aris Sulistyono yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Gerbangkertasusila.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2019 ?

## **1.3. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2019.
2. Menganalisis apakah ada pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2019.
3. Menganalisis apakah ada pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2019.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi ulasan teoritis yang berkenaan dengan tenaga kerja yakni pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

##### **2. Praktik**

a) Bagi Peneliti yaitu menambah pengetahuan dan referensi serta sebagai sarana untuk mengembangkan kualitas intelektual. Selain itu, membantu penulis dalam menganalisa penelitian serta memperoleh bukti empiris tentang pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2019.

b) Bagi Pemerintah adalah sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memperhatikan kondisi ketenagakerjaan provinsi Jawa Timur dan standar upah minimum kabupaten/kota dalam penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2019. Selain itu, dijadikan bahan masukan bagi perencana pembangunan dalam merumuskan perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan di provinsi Jawa Timur.

c) Bagi Akademisi yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian berikutnya.